



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN
2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Lampiran Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

20. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 93);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

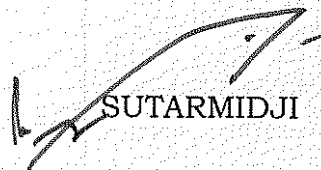
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 84

A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan	1-01	2-22	0-00	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR
		1-01	2-22	0-00	01	0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-01	2-22	0-00	01	0001	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
1-2	Kesehatan	1-02	0-00	0-00	01		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR
		1-02	0-00	0-00	01	0000	Dinas Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	0001	UPT Pelatihan Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	0002	UPT Laboratorium Kesehatan
		1-02	0-00	0-00	01	0003	UPT Pelayanan Kesehatan Paru
		1-02	0-00	0-00	01	0004	UPT Kesehatan Kerja dan Kesehatan Masyarakat
		1-02	0-00	0-00	01	0005	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong
		1-02	0-00	0-00	02	0000	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso
		1-02	0-00	0-00	03	0000	Rumah Sakit Jiwa Provinsi
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-02	0-00	0-00	04	0000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong
		1-03	2-10	0-00	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALBAR
		1-03	2-10	0-00	01	0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1-04	0-00	0-00	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-04	0-00	0-00	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR
		1-04	0-00	0-00	01	0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1-5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1-04	0-00	0-00	01	0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1-05	0-00	0-00	01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR
		1-05	0-00	0-00	01	0000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1-05	0-00	0-00	02		BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR
1-6	Sosial	1-05	0-00	0-00	02	0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1-06	0-00	0-00	01		DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR
		1-06	0-00	0-00	01	0000	Dinas Sosial
		1-06	0-00	0-00	01	0001	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma
		1-06	0-00	0-00	01	0002	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma
		1-06	0-00	0-00	01	0003	UPT Panti Sosial Anak

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-07	3-32	0-00	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR
		2-07	3-32	0-00	01	0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		2-07	3-32	0-00	01	0001	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
		2-07	3-32	0-00	01	0002	UPT Latihan Kerja Industri
		2-07	3-32	0-00	01	0003	UPT Latihan Kerja Industri Entikong
		2-07	3-32	0-00	01	0004	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
		2-07	3-32	0-00	01	0005	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-08	0-00	0-00	01		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALBAR
		2-08	0-00	0-00	01	0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2-08	0-0	0-00	01	0001	UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak
2-9	Pangan	2-09	0-00	0-00	01		DINAS KETAHANAN PANGAN
		2-09	0-00	0-00	01	0000	Dinas Ketahanan Pangan
		2-09	3-27	0-00	01		DINAS PANGAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR
		2-09	3-27	0-00	01	0000	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
2-10	Pertanahan	4-01	2-10	0-00	01		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		4-01	2-10	0-00	01	0001	Biro Pemerintahan
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	3-28	0-00	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALBAR
		2-11	3-28	0-00	01	0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2-12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-12	2-14	0-00	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
		2-12	2-14	0-00	01	0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-00	0-00	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR
		2-13	0-00	0-00	01	0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2-14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-12	2-14	0-00	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR
		2-12	2-14	0-00	01	0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2-15	Perhubungan	2-15	0-00	0-00	01		DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALBAR
		2-15	0-00	0-00	01	0000	Dinas Perhubungan
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	0000	Dinas Komunikasi dan Informatika

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-00	0-00	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALBAR
		2-17	0-00	0-00	01	0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-17	0-00	0-00	01	0001	UPT Pelatihan Koperasi
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-00	0-00	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALBAR
		2-18	0-00	0-00	01	0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	3-26	0-00	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR
		2-19	3-26	0-00	01	0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2-20	Statistik	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-21	Persandian	2-16	2-20	2-21	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR
		2-16	2-20	2-21	01	01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2-22	Kebudayaan	1-01	2-22	0-00	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR
		1-01	2-22	0-00	01	0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-01	2-22	0-00	01	0002	UPT Taman Budaya
		1-01	2-22	0-00	01	0003	UPT Museum
2-23	Perpustakaan	2-23	2-24	0-00	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR
		2-23	2-24	0-00	01	0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2-24	Kearsipan	2-23	2-24	0-00	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALBAR
		2-23	2-24	0-00	01	0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-00	0-00	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR
		3-25	0-00	0-00	01	0000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3-25	0-00	0-00	01	0001	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		3-25	0-00	0-00	01	0002	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
		3-25	0-00	0-00	01	0003	UPT Pelabuhan Perikanan
3-26	Pariwisata	2-19	3-26	0-00	01		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR
		2-19	3-26	0-00	01	0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3-27	Pertanian	3-27	0-00	0-00	01		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	01	0000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>~</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3-27	0-00	0-00	01	0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
		3-27	0-00	0-00	01	0002	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	0003	UPT Pembenihan Tanaman Pangan
		3-27	0-00	0-00	01	0004	UPT Balai Benih Induk Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	01	0005	UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
		3-27	0-00	0-00	02		DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	02	0000	Dinas Perkebunan
		3-27	0-00	0-00	02	0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
		3-27	0-00	0-00	03		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	03	0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	03	0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
		3-27	0-00	0-00	03	0002	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-00	0-00	03	0003	UPT Pembenihan Tanaman Pangan
		3-27	0-00	0-00	04		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALBAR
		3-27	0-00	0-00	04	0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3-27	0-00	0-00	04	0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
		3-27	0-00	0-00	04	0002	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
		2-09	3-27	0-00	01		DINASPANGAN,PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR
		2-09	3-27	0-00	01	0000	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2-09	3-27	0-00	01	0001	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
		2-09	3-27	0-00	01	0002	UPT Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak
3-28	Kehutanan	2-11	3-28	0-00	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALBAR
		2-11	3-28	0-00	01	0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	3-28	0-00	01	0001	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas
		2-11	3-28	0-00	01	0002	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		2-11	3-28	0-00	01	0003	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah
		2-11	3-28	0-00	01	0004	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak
		2-11	3-28	0-00	01	0005	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya
		2-11	3-28	0-00	01	0006	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi
		2-11	3-28	0-00	01	0007	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong
		2-11	3-28	0-00	01	0008	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara
		2-11	3-28	0-00	01	0009	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan
		2-11	3-28	0-00	01	0010	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau
		2-11	3-28	0-00	01	0011	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat
		2-11	3-28	0-00	01	0012	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur
		2-11	3-28	0-00	01	0013	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Timur
		2-11	3-28	0-00	01	0014	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara
		2-11	3-28	0-00	01	0015	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara
		2-11	3-28	0-00	01	0016	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur
		2-11	3-28	0-00	01	0017	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan
3-29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3-29	0-00	0-00	01		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR
		3-29	0-00	0-00	01	0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-29	3-30	3-31	01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR
		3-29	3-30	3-31	01	0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3-30	Perdagangan	3-29	3-30	3-31	01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR
		3-29	3-30	3-31	01	0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-29	3-30	3-31	01	0001	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		3-31	3-30	0-00	01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR
		3-31	3-30	0-00	01	0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3-31	3-30	0-00	01	0002	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

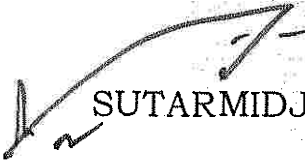
KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
3-31	Perindustrian	3-29	3-30	3-31	01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALBAR
		3-29	3-30	3-31	01	0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-30	0-00	01		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR
		3-31	3-30	0-00	01	0000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar
		3-31	3-30	0-00	01	0001	UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
3-32	Transmigrasi	2-07	3-32	0-00	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR
		2-07	3-32	0-00	01	0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat Daerah	4-01	2-10	0-00	01		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
		4-01	2-10	0-00	01	0000	Sekretariat Daerah
		4-01	2-10	0-00	01	0001	Biro Pemerintahan
		4-01	2-10	0-00	01	0002	Biro Hukum
		4-01	2-10	0-00	01	0003	Biro Kesejahteraan Rakyat
		4-01	2-10	0-00	01	0004	Biro Perekonomian
		4-01	2-10	0-00	01	0005	Biro Administrasi Pembangunan
		4-01	2-10	0-00	01	0006	Biro Organisasi
		4-01	2-10	0-00	01	0007	Biro Umum
		4-01	2-10	0-00	01	0008	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
4-2	Sekretariat DPRD	4-02	0-00	0-00	01		SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR
		4-02	0-00	0-00	01	0000	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-01	0-00	0-00	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-01	0-00	0-00	01	0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5-2	Keuangan	5-02	0-00	0-00	01		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-02	0-00	0-00	01	0000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		5-02	0-00	0-00	02		BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-02	0-00	0-00	02	0000	Badan Pendapatan Daerah
		5-02	0-00	0-00	02	0001	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I
		5-02	0-00	0-00	02	0002	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang
		5-02	0-00	0-00	02	0003	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah
		5-02	0-00	0-00	02	0004	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau
		5-02	0-00	0-00	02	0005	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		5-02	0-00	0-00	02	0006	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putusibau
		5-02	0-00	0-00	02	0007	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang
5-3	Kepegawaian	5-03	0-00	0-00	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-03	0-00	0-00	01	0000	Badan Kepegawaian Daerah
5-4	Pendidikan dan Pelatihan	5-04	0-00	0-00	01		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALBAR
		5-04	0-00	0-00	01	0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5-5	Penelitian dan Pengembangan	5-05	0-00	0-00	01		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR
		5-05	0-00	0-00	01	0000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5-6	Penghubung	5-06	0-00	0-00	01		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALBAR
		5-06	0-00	0-00	01	0000	Badan Penghubung
5-7	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-07	0-00	0-00	01		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALBAR
		5-07	0-00	0-00	01	0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalbar
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-01	0-00	0-00	01		INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR
		6-01	0-00	0-00	01	0000	Inspektorat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8-1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8-01	0-00	0-00	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR
		8-01	0-00	0-00	01	0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

✓ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, c


SUTARMIDJI